BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA PEKALONGAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

*P*uji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Pertanian dan Pangan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*Good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhir kata, laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pekalongan, Februari 2026

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

LILI SULISTYAWATI, S.Pi, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700711 199603 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025. Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2025 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Pertanian dan Pangan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan, adalah sebagai berikut :

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 76,25.

   Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan sebesar 76,40 dengan predikat BB. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,20%.
2. Indikator Persentase penanganan daerah rawan pangan target yang ditetapkan sebesar 100%.

   Berdasarkan jumlah daerah rawan pangan yang tertangani tahun N / Jumlah daerah rawan pangan tahun N* 100% adalah 4/4*100% = 100%. Sehingga capaian untuk indikator Persentase penanganan daerah rawan pangan sebesar 100 %.
3. Indikator Nilai Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan target yang ditetapkan sebesar 255.445,13 Rp. juta.

   Berdasarkan Nilai produksi tanaman pangan hortikultura + Nilai produksi peternakan / 1 jt = 62,15 + 286,27 / 1.000.000 = 348,42 / 1.000.000 = 348.42

Rp. juta. Sehingga capaian untuk indikator Nilai Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar 136,39 %.

Kinerja keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 6.521.845.987,00-. atau 90,04 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 7.243.445.000,00,-.

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudan harapan tersebut.

Kendala yang dihadapi :

1. Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat di Kota Pekalongan, tercermin dari skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kota Pekalongan yang masih belum mencapai skor 100. Hal ini perlu diatasi dengan berbagai upaya diantaranya yaitu melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) serta peningkatan ketrampilan dalam pengolahan pangan berbasis pangan lokal dan berbagai upaya diversifikasi pangan lainnya baik melalui sosialisasi, lomba maupun pelatihan.
2. Jumlah cadangan pangan daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang belum sesuai dengan jumlah yang dianjurkan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional RI No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
3. Masih kurangnya dukungan pemerintah daerah dan lintas sektoral dalam pembangunan ketahanan pangan.
4. Masih ditemukannya pangan segar tidak aman di pasaran. Perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan rutin khususnya di pasar-pasar tradisional. Selain itu juga perlu terus dilakukan edukasi terkait keamanan pangan dengan sasaran masyarakat pada umumnya.
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk olahan pangan variasi. Hal ini perlu diatasi dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan B2SA dan upaya meningkatkan

13. Merebaknya isu penyakit hewan menular baru (New Emerging Disease), maka perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dengan konsep One Health, terpadu bersama instansi terkait kesehatan dan lembaga pendidikan ;
14. Penjualan bahan pangan asal hewan yang kurang memenuhi syarat ASUH di pasar tradisional, terutama pasar darurat Banjarsari. Permasalahan ini diatasi dengan meningkatkan peran masyarakat dan aparatur pengawas dalam proses penyediaan bahan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal ;
15. Masih adanya pemilik lahan yang membiarkan lahan pertanian terbengkalai karena berbagai alasan seperti lokasi tersebut sudah tidak memiliki jaringan irigasi, atau sengaja untuk persiapan alih fungsi.

Langkah kedepan :

1. Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dokumen perencanaan strategis (Renstra), Pengukuran Kinerja (IKU), hingga pedoman monitoring dan evaluasi agar antara dokumen- dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur hingga dapat terlihat capaian keluaran (output), hasil (outcome), hingga manfaat (Benefit) yang mencerminkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang optimal, efektif dan efisien ;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang diamanatkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan mekanisme per triwulan ;
3. Seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan memberikan kontrol serta tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kinerja jajaran dibawahnya, dengan memberlakukan mekanisme reward dan punishment, agar dapat terfokus terhadap target- target yang ditetapkan hingga tercapai hasil yang maksimal ;
4. Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik koordinasi yang dilakukan dengan lingkup internal ataupun pihak/ lembaga/ instansi lain pusat dan daerah yang terkait langsung dengan upaya dan proses pencapaian sasaran strategis yang dimaksud.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 KONDISI APARATUR

1.4 SARANA DAN PRASARANA

1.5 ISU STRATEGIS

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

3.5 INOVASI

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 - 2026
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Penyusunan LkjIP Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam rencana kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak- pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LkjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang ada di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan sebagai berikut :

Kedudukan

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana kewenangan daerah di bidang Pertanian dan Pangan sesuai dengan arah kebijakan Walikota, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan.

Tugas

Tugas melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan pangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
5. penyusunan program penyuluhan pertanian dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
6. penataan dan pengawasan prasarana pertanian;
7. pembinaan produksi di bidang pertanian dan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
8. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
9. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
10. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;

11. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
12. pelaksanaan administrasi program dan kegiatan Dinperpa, dan ;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya

Susunan Organisasi

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan didukung oleh Pejabat-Pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/ komponen Sekretariat, Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Ketahanan Pangan. Jajaran komponen beserta unit satuan kerja masing-masing, diuraikan sebagai berikut:

a. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
d. Bidang Ketahanan Pangan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing- masing unsur dari Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas :

Menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan.

b. Fungsi :
    1. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, di urusan pertanian dan ketahanan pangan;
    2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi ;
    3. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan ;

4. Pengelolaan barang milik daerah/ kekayaan negara ; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Tugas

Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

b. Fungsi

1. Perumusan program kerja bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
2. Penyusunan kebijakan teknis lingkup produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
3. Penyelenggaraan program peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
4. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup produksi tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
5. Penyelenggaraan pemberian rekomendasi di bidang produksi, tanaman pangan, hortikultura dan konservasi lahan dan air irigasi, pengembangan sarana prasarana dan alat mesin, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian;
6. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
7. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Tugas :

menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

b. Fungsi :

e

r

u

2. penyusunan kebijakan di bidang produksi dan usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan serta kesehatan hewan;
3. penyelenggaraan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
4. penyelenggaraan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta kesehatan hewan;
5. penyelenggaraan pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
6. penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis perijinan/sertifikasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
7. penyelenggaraan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
8. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Bidang ketahanan Pangan

a. Tugas :

Menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan.

b. Fungsi :

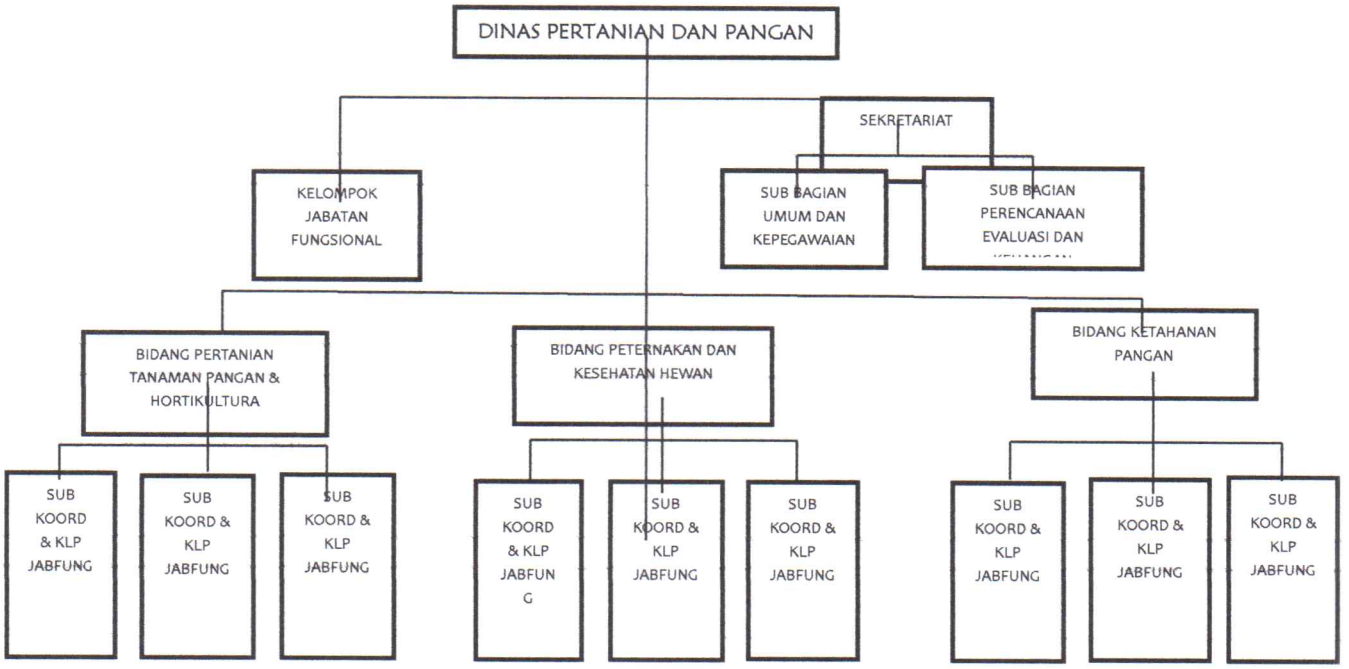
e

2. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
3. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
4. Pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
4. Pengkoordinasian pengelolaan Keamanan Pangan kabupaten/ kota;
5. Pengkoordinasian penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ketahanan pangan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
6. Penyelenggaraan evaluasi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
7. Penyelenggaraan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
8. Pengkoordinasian penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota;
9. Pengkoordinasian pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Keamanan Pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah;
10. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
11. Pengkoordinasian upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seksi ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, Keamanan Pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
12. Perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
13. Pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan, sebagaimana gambar dibawah ini :

Struktur Organisasi



1.3 KONDISI APARATUR

Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025.

Jumlah pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan per 30 Juni 2025 sebanyak 61 orang yang terdiri dari 36 orang PNS, 3 Orang PPPK dan 22 orang non PNS. PNS terdiri dari 7 orang pejabat struktural yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III, 2 orang eselon IV dan 31 orang staf. Dengan rincian staf fungsional umum sebanyak 11 orang, dan staf fungsional teknis sebanyak 20 orang, serta dengan klasifikasi pendidikan sebagaimana tabel II.1. dibawah ini :

Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN					GENDER		TOTAL (ORANG)
		SLTA	D3	S-1	S-2	S3	L	P	
	KEPALA :								
1	LILI SULISTYAWATI, S.Pi., M.Si. 19700711 199603 2 003				v			v	1
	SEKRETARIAT :								9
2	Ir. DARSARI RESTI ARTANTI, MM 19680228 199203 2 004				v			V	
3	DYAH FITRIANA, S.Sos 19740718 199803 2 003			v				V	
4	RAPIH ROSYIDATI,A.Md 19790905 200501 2 010		v					V	
5	MUHINDRA, S.E. 19940710 202012 1 015			v			V		
6	ARRY ROCHMAN,S.Kom 19880418 202012 1 009			v			V		
7	WILDAN HIBATULLAH,S.Kom 19980630 202203 1 012			v			V		
8	ETIN ROSADA,S.P. 19911016 202203 1 012			v				V	
9	FAIZAH 1740914 201212 2 001	v						V	
10	TEJO WRIHATNOLO,A.Md. 19931225 202421 1 003		v				V		
	BIDANG KETAHANAN PANGAN :								5
11	ANI KUSUMANINGRUM,S.Psi 19711022 200312 2 003			V				V	
12	IVAH ISTIYANI, S. Gz 19860910 201502 2 001			V				V	
13	ADNAN YANUAR SUYOTO,S.E. 19940122 202203 1 014			V			V		
14	MUHAMMAD MUJADID FAIQON,S.P 19930402 202203 1 011			V			V		
15	JOKO PRAYITNO 19851012 200801 1 001	v					V		
	BIDANG PERTANIAN TANAMAN DAN HORTIKULTURA :								5

NO	BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN					GENDER		TOTAL (ORANG)
		SLTA	D3	S-1	S-2	S3	L	P	
16	MOH. KARMANI, S.STP,MM 19780416 199802 1 001				v		V		
17	SUHARSONO, S.I.P,M.M. 19680418 198903 1 007				v		V		
18	NOERMAS AWALIYAH,S.Si 19980823 202203 2 015			v				V	
19	GILANG BAGUS PRADANA 19931023 202203 1 010			v			V		
20	SYIFA MAULINA INDIKA, S.Si. 19960925 202504 2 001			v				V	
	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN :								11
21	IMAN ISTIADI, ST 19790224 200604 2 010			V			V		
22	drh. FITRIA KHURNIAWATI 19770914 200312 2 003			V				V	
23	drh. NUR CHASANAH 19701129 200501 2 004			V				V	
24	drh. BINTANG PERKASA BRAMANTO 19920124 201903 1 001			V			V		
25	drh. DIYAH SRI SAYEKTI 19831224 200902 2 001			V				V	
26	UMMI ROSYIDAH, S. Pt. 19811210 201001 2 004			V				V	
27	SLAMET EDY 19700318 200801 1 005	V					V		
28	KAESI FIKRIYATI,A.Md 19860503 202012 2 004		V					V	
29	DIMAS ARDIAN,A.Md.Pt 19961014 202012 1 008		V				V		
30	MUHAMAD ROFIK 19770208 200801 1 006	V					V		
31	SULISMONO 19740605 200801 1 010	V					V		
	PENYULUH PERTANIAN :								8
32	AMALIA KHUSNA, S.TP 19840330 201001 2 020			V				V	
33	LAZIM SOFI, SP 19841205 200902 1 002			V			V		
34	RISWATI.SP 19830521 201502 2 001			V				V	
35	IMAN PRASETYO JATI 19790604 201001 1 012			V			V		
36	EKO WAHYUDI 19781003 201001 1 004			V			V		
37	YETTY MARLINCE, S.Tr.P. 19990428 2025042 001			V				V	
38	SUNDARI 19691012 202121 2 003	V						V	
39	NURIATI DWI ASTUTI 19720309 202121 2 002	V						V	
	Jumlah :	**7**	**4**	**24**	**4**	**0**	**19**	**20**	**39**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, 30 Juni 2025

Komposisi Pegawai Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	NON ASN	
1	Kepala			1			1
2	Sekretariat	1	6	1	1	8	17
3	Ketahanan Pangan	1	4			1	6
4	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura		3	2		4	9

NO	BIDANG	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
		II	III	IV	PPPK	NON ASN	
5	Peternakan dan Kesehatan Hewan	4	2	3		9	18
6	Penyuluh Pertanian		8		2	0	10
	Jumlah :	**6**	**23**	**7**	**3**	**22**	**61**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, 30 Juni 2025

1.4 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan
1	Tanah	4	unit
2	Bangunan Gedung	33	unit
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	Unit
4	Jalan dan Jembatan	6	Unit
5	Bangunan Air	5	Unit
6	Instalasi	5	Unit
7	Jaringan	8	Unit
8	Alat Besar	18	Unit
9	Alat Angkutan	34	Unit
10	Alat Bengkel dan Alat Ukur	13	Unit
11	Alat Pertanian	93	Unit
12	Alat Kantor dan Rumah Tangga	257	Unit
13	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	32	Unit
14	Alat Kedokteran dan Kesehatan	17	Unit
15	Alat Laboratorium	45	Unit
16	Komputer	85	Unit
17	Alat Keselamatan Kerja	1	Unit

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, Rekon Aset Semester 1 Tahun 2025.

1.5 ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Dinas Pertanian dan pangan Kota Pekalongan dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

1. Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat di Kota Pekalongan, tercermin dari skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kota Pekalongan yang masih belum mencapai skor 100. Hal ini perlu diatasi dengan berbagai upaya diantaranya yaitu melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) serta peningkatan

ketrampilan dalam pengolahan pangan berbasis pangan lokal dan berbagai upaya diversifikasi pangan lainnya baik melalui sosialisasi, lomba maupun pelatihan.

2. Jumlah cadangan pangan daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang belum sesuai dengan jumlah yang dianjurkan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional RI No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
3. Masih kurangnya dukungan pemerintah daerah dan lintas sektoral dalam pembangunan ketahanan pangan.
4. Masih ditemukannya pangan segar tidak aman di pasaran. Perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan rutin khususnya di pasar-pasar tradisional. Selain itu juga perlu terus dilakukan edukasi terkait keamanan pangan dengan sasaran masyarakat pada umumnya.
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk olahan pangan variasi. Hal ini perlu diatasi dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan B2SA dan upaya meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam upaya diversifikasi pangan melalui sosialisasi, lomba dan pelatihan. untuk olahan pangan variasi melalui sosialisasi dan pelatihan;
6. Faktor alam berupa banjir hujan/ air pasang (rob), mengakibatkan lahan pertanian yang terdampak rob dengan kadar salinitas yang lebih tinggi dari normal. Solusi permasalahan tersebut dengan mengajukan bantuan bibit padi tahan salinitas tinggi ke Pemerintah Pusat sebagai upaya agar petani yang terdampak rob tetap bisa melakukan usaha tani ;
7. Lokasi Kota Pekalongan yang berada di pesisir Pantai, mengakibatkan pengairan air irigasi pertanian mengandalkan kiriman dari wilayah sekitar, sehingga saat musim kemarau, volume air yang sampai ke Pekalongan jumlahnya berkurang, sementara kondisi irigasi yang ada juga sudah banyak yang mengalami penyempitan/ pendangkalan.
8. Kesadaran para petani untuk menanam secara serentak dalam 1 (satu) area yang kurang, sehingga resiko serangan hama dimungkinkan silih berganti.
9. Pemanfaatan alsintan yang masih terbatas, dimana petani masih mengandalkan tenaga manusia, dari pembenihan hingga panen, yang

membutuhkan biaya besar, sementara tenaga kerja sudah mulai berkurang.

10. Permintaan alih fungsi lahan pertanian yang tinggi, terumata untuk penyediaan rumah tinggal dan tempat usaha, sehingga perlu dilakukan pencermatan kondisi lapangan dan hanya memberikan rekomendasi AFL apabila lahan dimaksud peruntukan diluar non pertanian sesuai RTRW Kota Pekalongan, sehingga perlu ada pengawalan bersama dinas teknis lainnya dalam menjaga lahan sawah dilindungi (LSD)
11. Terbatasnya jumlah Kios Penyedia Pupuk Lengkap (KPL) di Kota Pekalongan, yang tutup pada tahun ini adalah KPL Tani Berhasil dan Wahana Tani serta di akhir tahun segera menyusul KUD Pekalongan, sehingga tahun 2025 hanya ada 2 (dua) KPL.
12. Menyempitnya lahan budidaya ternak di wilayah Kota Pekalongan, oleh karena itu perlu dilakukan intensifikasi usaha ternak dengan memanfaatkan teknologi berwawasan lingkungan ;
13. Merebaknya isu penyakit hewan menular baru (New Emerging Disease), maka perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dengan konsep One Health, terpadu bersama instansi terkait kesehatan dan lembaga pendidikan ;
14. Penjualan bahan pangan asal hewan yang kurang memenuhi syarat ASUH di pasar tradisional, terutama pasar darurat Banjarsari. Permasalahan ini diatasi dengan meningkatkan peran masyarakat dan aparatur pengawas dalam proses penyediaan bahan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal ;
15. Masih adanya pemilik lahan yang membiarkan lahan pertanian terbengkalai karena berbagai alasan seperti lokasi tersebut sudah tidak memiliki jaringan irigasi, atau sengaja untuk persiapan alih fungsi.

Adapun peluang yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan adalah antara lain :

1. Kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan alsintan ;
2. Terbangunnya bendung gerak di wilayah utara yang mengakibatkan wilayah- wilayah yang dulu tergenang mulai mongering, sehingga

memungkinkan untuk difungsikan kembali, tentunya dengan penanganan khusus termasuk untuk mengembalikan lahan eks pertanian ;

3. Adanya kebijakan penggunaan KTP selain Kartu tani, sehingga memberikan kemudahan petani dalam menebus pupuk bersubsidi sesuai wilayah layanan masing- masing KPL ;
4. Penambahan alokasi pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani dalam budidaya tanaman pangan dengan harapan tidak ada lagi terjadinya kelangkaan pupuk ;
5. Animo masyarakat yang cukup tinggi untuk mengikuti edukasi pertanian sejak dini, dengan mengirimkan siswa PAUD/TK/SD ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkannya dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment*/ cascading dari program serta tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan

.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada
Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-1 : Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat		

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Tujuan Kota : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	
Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Meningkatkan Ketahanan pangan daerah	Skor PPH Konsumsi	81,03
Sasaran Kota : Meningkatnya indeks keluarga sehat	Indeks keluarga sehat	
Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Optimalnya penanganan rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	100 %
Program Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	20 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/ kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 2 : Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/ kota	Persentase ketercapaian pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 3 : Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan	3 kegiatan
Program Dinas Pertanian dan Pangan 2 : Program Penanganan kerawanan pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di kota Pekalongan	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	Jumlah kecamatan tahan pangan di kota Pekalongan	4 kecamatan
Program Dinas Pertanian dan Pangan 3 : Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	86,40 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Pelaksanaan	Jumlah pangan segar aman yang	26 sampel

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/ kota	ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	
Misi Ke-5 : Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal		
Tujuan Kota : Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB perkapita	
Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Meningkatkan Produksi tanaman pangan hortikultura dan peternakan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	0,20
Sasaran Kota : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	
Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan hortikultura dan peternakan	Nilai produksi tanaman pangan hortikultura dan peternakan	255.445,13 Rp. juta
Program Dinas Pertanian dan Pangan 4 : Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.Nilai produksi pertanian pertahun 2.Nilai produksi peternakan pertahun	55,78 miliar rupiah 199,66 miliar rupiah
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 2 : Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/ kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan tumbuhan dan mikro organisme wewenang Kabupaten/ kota	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 3 : Peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/ kota	Jumlah kegiatan Peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten/ kota	5 kali

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
Program Dinas Pertanian dan Pangan 5 : Program Penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Pembangunan prasarana pertanian	Persentase prasarana yang digunakan (IKK output)	100 %
Program Dinas Pertanian dan Pangan 6 : Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten / kota		
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 2 : Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah Kabupaten/ kota		
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 3 : Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/ kota	Persentase hewan yang tertangani di Puskeswan	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 4 : Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 %
Program Dinas Pertanian dan Pangan 7 : Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ kota	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan	4 kali

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
	bencana pertanian Kabupaten/ kota	
Program Dinas Pertanian dan Pangan 8 : Program Perizinan usaha pertanian	Persentase usaha pertanian/ peternakan yang memiliki ijin	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Penerbitan ijin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, rumah potong hewan	Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin	100 %
Program Dinas Pertanian dan Pangan 9 : Program Penyuluhan pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani pertahun	5 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 %
Misi ke-7 : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip- prinsip Good Governance dan Clean Goverment		
Tujuan Kota : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	
Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan : Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	84,60
Sasaran kota : Meningkatnya kualitas layanan public (Smart Government)	IKM Kota	
Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76,25
Program Dinas Pertanian dan Pangan : Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ kota	1.Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 2.Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan	100 %

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
	pemerintahan daerah 3.Persentase pengadaan/ pemeliharaan Barang Milik Daerah	
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 1 : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 2 : Administrasi keuangan Perangkat daerah	Persentase ketercapaian Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 3 : Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 4 : Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 5 : Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan 6 : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Pertanian dan Pangan disajikan pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1

Target Sasaran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Inspektorat Daerah
2	Optimalnya penanganan rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani tahun N dibagi Jumlah daerah rawan pangan tahun N dikali 100 %	Susenas
3	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	Nilai produksi tanaman pangan ditambah Nilai produksi hortikultura ditambah Nilai produksi peternakan dibagi 1jt	BPS

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2
Target Sasaran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	72.50	74.00	75.50	76.00	76.25	76.50
2	Optimalnya penanganan rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	240016.55	243762.11	247578.72	251474.39	255445.13	259492.90

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Pertanian dan Pangan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERUBAHAN 2025	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	80,27 indeks	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bag. Organisasi
2.	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Skor PPH Konsumsi	81,03 skor	Formulasi : Skor PPH Konsumsi tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Susenas
3.	Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	0,20 %	Formulasi : Rata-rata pertumbuhan Nilai produksi tanaman pangan + Nilai produksi hortikultura + Nilai produksi peternakan Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinperpa
Sasaran :				
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	76,25 indeks	Formulasi : Nilai SAKIP tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Optimalnya penanganan rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	100 %	Formulasi : Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani tahun N / Jumlah daerah rawan pangan tahun N * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Susenas
3.	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	255.445,13 Rp.Juta	Formulasi : Nilai produksi tanaman pangan + Nilai produksi hortikultura + Nilai produksi peternakan / 1jt Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Rp. 5.786.116.000,-	DTU-DAU
Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 478.373.000,-	DTU-DAU
Program Penanganan kerawanan pangan	Rp. 24.361.000,-	DTU-DAU
Program Pengawasan keamanan pangan	Rp. 26.500.000,-	DTU-DAU
Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp. 420.828.000,-	DTU-DAU/DAKNF
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 116.466.000,-	DTU-DAU
Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp. 283.232.000,-	DTU-DAU
Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp. 12.300.000,-	DTU-DAU
Program Perizinan usaha pertanian	Rp. 15.137.000,-	DTU-DAU
Program Penyuluhan pertanian	Rp. 85.132.000,-	DTU-DAU
Jumlah Anggaran Perubahan Tahun 2025 =	**Rp. 7.248.445.000,-**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Pertanian dan Pangan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

  Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan

pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.

- Arahan Operasional

  Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

- Akuntabilitas

  Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

- Perencanaan

  Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

- Pengelolaan

  Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

- Penganggaran

  Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

- Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

  Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

- Pengawasan Kerja

  Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{Target}{Realisasi} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,25	76,40	100,20	Tercapai
2	Optimalnya penanganan rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100	100	100	Tercapai
3	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	255445 ,13	348420,0	136,39	Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 3 target;

2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;

3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 112,19 % dengan kategori "Sangat Berhasil".

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74,25	75,75	76,10	76,40	▲
2	Optimalnya penanganan rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100	100	100	100	●
3	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	347430,80	318905,67	334022,55	348420,0	▲

Keterangan :

▲ = Naik

● = Tetap

▼ = Turun

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,40	76,50	99,86	Tidak Tercapai
2	Optimalnya penanganan rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100	100	100	Tercapai
3	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	348420,0	259492,90	134,26	Tercapai

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/ Nasional/ Internasional	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,40	BB - A	100,20	Berhasil
2	Optimalnya penanganan rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100	93,58	100	Berhasil
3	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	348420,0	n/a	136,39	Sangat Berhasil

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun kesimpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	indeks	84,60	89,50	105,79	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Skor PPH Konsumsi	skor	81,03	97,17	119,91	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan produksi tanaman pangan hortikultura dan peternakan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	persen	0,20	1,77	885	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 3 target;

2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;

3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 104,56 % dengan kategori "Sangat Berhasil".

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	74,00	indeks	75,75	76,10	76,25	76,40	100,20	76,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Dinas Pertanian dan Pangan memperoleh nilai 76,40 atau predikat "Sangat Baik (BB)". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Pertanian dan Pangan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Capaian evaluasi AKIP Dinas Pertanian dan Pangan ini melebihi target nilai SAKIP nasional tahun 2025, dimana KemenPAN RB mendorong instansi pemerintah mencapai predikat minimal "BB" (Sangat Baik) hingga "A" (Memuaskan).

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 sebagai berikut :

Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15	11,85
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	20,75
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**76,40**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Predikat)		**BB**	

Capaian nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2025 yaitu 73,28 dengan predikat "BB" (Sangat Baik). Adapun perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pertanian dan Pangan dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
1	BAPPEDA	88,50
2	DINKOMINFO	83,40
3	DLH	85,45
4	DINDAGKOP & UMKM	85,75
5	INSPEKTORAT	84,60
6	DPU-PR	81,25
7	BPKAD	84,50
8	DPMPPA	82,75
9	DKP	83,25
10	BKPSDM	83,20
11	DINDUKCAPIL	82,90

12	DINKES	83,20
13	SETDA	81,50
14	DINDIK	78,45
15	DINPARBUDPORA	77,55
16	DPMPTSP	77,90
17	DINAS PERHUBUNGAN	77,15
18	DINPERPA	76,40
19	KEC.PEKALONGAN SELATAN	77,00
20	DINARPUS	75,45
21	KEC.PEKALONGAN BARAT	76,15
22	KEC.PEKALONGAN UTARA	76,10
23	KEC.PEKALONGAN TIMUR	76,25
24	BPBD	75,45
25	DINPERINAKER	75,45
26	DINSOSP2KB	75,90
27	DINPERKIM	74,75
28	SATPOL - P3KB	74,25
29	SEKRETARIAT DPRD	75,15
30	KESBANGPOL	73,45

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.433.000	18.633.000	18.632.600	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah berkontribusi langsung pada indicator Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.140.250.000	5.009.456.000	4.329.374.546	Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah berkontribusi langsung pada indicator Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berkontribusi langsung pada indicator Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.450.000	199.138.000	195.364.885	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berkontribusi langsung pada indicator Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	332.643.000	357.231.000	355.103.849	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah berkontribusi langsung pada indicator Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.838.000	196.658.000	179.178.300	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah berkontribusi langsung pada indicator Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-Anggaran Rp.18.633.000,- -Realisasi anggaran Rp. 18.632.600,- (99,95%). -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,05% yang berasal dari pemadatan kegiatan rapat internal yang mana beberapa topik / permasalahan dilaksanakan dalam satu kali rapat.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan dan beban kerja sehingga setiap personil merangkap tugas	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua tugas/ laporan yang ditargetkan diselesaikan tepat waktu.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-Anggaran Rp. 5.009.456.000,- -Realisasi anggaran Rp. 4.329.374.546,- (86,42%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 13,57% yang berasal dari pengurangan volume ASN yang menerima gaji dan tunjangan.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan dan beban kerja sehingga setiap personil merangkap tugas	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua tugas/ laporan yang ditargetkan diselesaikan tepat waktu.
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Anggaran dihapus.	Tidak ada	Tidak ada
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Anggaran Rp. 199.138.000,- -Realisasi anggaran Rp. 195.364.885,- (98,10%)	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding dengan	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua tugas/ laporan yang ditargetkan

	-Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 1,89% yang berasal dari pengurangan belanja rutin dan perjalanan dinas.	kebutuhan dan beban kerja sehingga setiap personil merangkap tugas	diselesaikan tepat waktu.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	-Anggaran Rp. 357.231.000,- -Realisasi anggaran Rp. 355.103.849,- (99,40%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,59% yang berasal dari penghematan penggunaan listrik.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan dan beban kerja sehingga setiap personil merangkap tugas	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua tugas/ laporan yang ditargetkan diselesaikan tepat waktu.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Anggaran Rp. 196.658.000,- -Realisasi anggaran Rp. 179.178.300,- (91,11%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 8,89% yang berasal dari selisih nilai kontrak pekerjaan fisik.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena jumlah SDM yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan dan beban kerja sehingga setiap personil merangkap tugas	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua tugas/ laporan yang ditargetkan diselesaikan tepat waktu.

Kesimpulan efisiensi :

Bahwa seluruh Kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh :

1. Rata-rata penghematan anggaran 4,998 % ;
2. Produktivitas SDM tinggi karena masing-masing personil merangkap tugas ;
3. Pelaksanaan tugas diselesaikan tepat waktu.

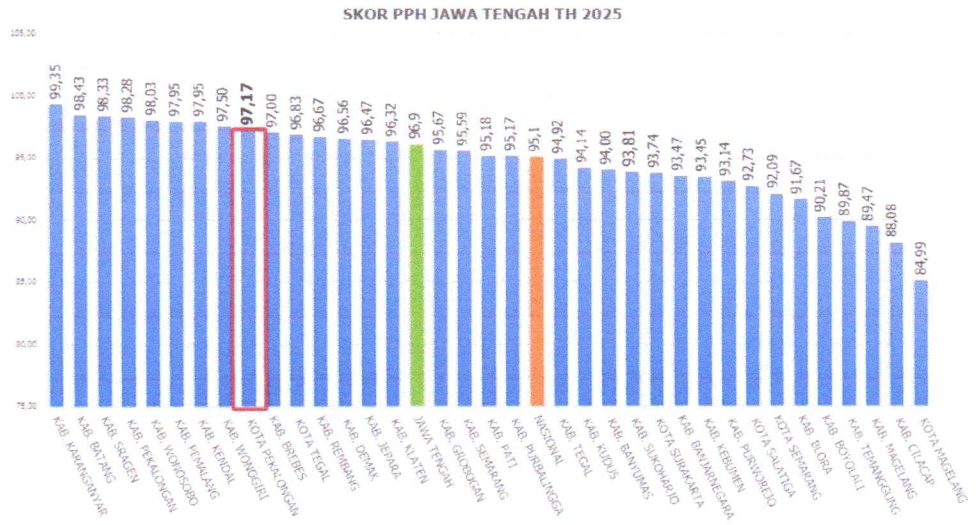
SASARAN 2 : Optimalnya penanganan rawan pangan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase penanganan daerah rawan pangan	100	%	100	100	100	100	100	100

Adapun capaian skor PPH Konsumsi Kota Pekalongan apabila dibandingkan capaiannya dengan Kabupaten/ kota lain di Jawa Tengah, dapat dilihat pada matrik perbandingan sebagai berikut :



Faktor pendukung keberhasilan capaian optimalnya penanganan rawan pangan antara lain sebagai berikut :

a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan penanganan rawan pangan ;
b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder melalui bidang Ketahanan Pangan dengan Dishanpan/ BPS dan instansi terkait lainnya ;
c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi Ketahanan Pangan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Program / Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	416.439.000	478.373.000	477.987.198	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Persentase Cadangan Pangan Daerah telah berjalan sangat baik dan menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan, serta memberikan kontribusi positif terhadap penguatan ketahanan pangan di Kota Pekalongan
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	129.157.000	116.307.000	116.076.810	Kegiatan tersebut mendukung capaian karena ketersediaan stok pangan daerah didukung oleh kondisi produksi pangan lokal yang relatif baik serta adanya sinergi dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya penguatan cadangan pangan Daerah
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	234.155.000	196.039.000	195.910.588	Kegiatan tersebut mendukung capaian karena adanya optimalisasi pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	53.127.000	166.027.000	165.999.800	Kegiatan tersebut mendukung capaian Karena turut mem pengaruhi penetapan target kinerja yang bersifat konservatif dibandingkan dengan kapasitas riil daerah dalam pembentukan dan pengelolaan cadangan pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	35.881.000	24.361.000	24.360.700	program ini dapat terealisasi dan memperoleh capaian sesuai target karena didukung oleh pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan yang berjalan efektif dan merata di seluruh kecamatan, serta didukung oleh koordinasi lintas sektor yang baik.
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	35.881.000	24.361.000	24.360.700	kegiatan tersebut mendukung dan berjalan efektif dan merata di seluruh kecamatan, serta didukung oleh koordinasi lintas sektor yang baik. Selama tahun berjalan tidak terdapat Kecamatan yang masuk kategori rawan pangan, sehingga indikator dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	27.450.000	26.500.000	25.559.300	Program ini dapat terealisasi dan memperoleh capaian melebihi target karena pelaksanaan pengawasan keamanan pangan dilaksanakan secara optimal dan konsisten, didukung oleh peningkatan kepatuhan pelaku usaha pangan terhadap standar keamanan pangan. Selain itu, pembinaan dan edukasi yang

Program / Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				berkelanjutan kepada pelaku usaha serta efektivitas pengambilan dan pengujian sampel pangan segar turut berkontribusi terhadap meningkatnya persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	27.450.000	26.500.000	25.559.300	Kegiatan tersebut mendukung karena pengawasan keamanan pangan dilaksanakan secara optimal dan konsisten, didukung oleh peningkatan kepatuhan pelaku usaha pangan terhadap standar keamanan pangan.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada ketiga program tersebut di atas yaitu :

Program/ Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-Anggaran Rp.116.307.000,- -Realisasi anggaran Rp. 116.076.810,- (99,80%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,20% yang berasal dari pengurangan kegiatan monev.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena dari pelaksanaan monev yang selama ini melibatkan banyak personil dipersingkat.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan tugas yang ditargetkan diselesaikan tepat waktu.
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-Anggaran Rp.196.039.000,- -Realisasi anggaran Rp. 195.910.588,- (99,93 %). -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,07% karena adanya perencanaan yang baik dan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena adanya perencanaan yang baik dan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan tugas / kegiatan diselesaikan tepat waktu.
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-Anggaran Rp.166.027.000,- -Realisasi anggaran Rp.165.999.800,- (99,98 %) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena setiap SDM yang tersedia dapat melaksanakan kegiatan	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan

	0,02% karena pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat serta perangkat daerah terkait.	yang telah direncanakan dengan baik.	diselesaikan tepat waktu.
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-Anggaran Rp.24.361.000,- -Realisasi anggaran Rp.24.360.700,- (99,99%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,01% karena proses pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan telah dilakukan sesuai jadwal dan metodologi yang ditetapkan. Data dan informasi terkait ketahanan pangan di lapangan dikumpulkan, dianalisis, dan diintegrasikan ke dalam dokumen peta sehingga menghasilkan 1 dokumen final yang lengkap. Pencapaian target ini mencerminkan efektivitas koordinasi, ketersediaan data yang memadai, serta keterlibatan pihak terkait dalam proses pemutakhiran peta dan analisis pangan	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena adanya efektivitas koordinasi, ketersedia an data yang memadai, serta keterlibatan pihak terkait dalam proses pemutakhiran peta dan analisis pangan.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan dapat direalisasikan sesuai target.
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-Anggaran Rp.26.500.000,- -Realisasi anggaran Rp.25.559.300,- (96,45%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 3,55% karena dipengaruhi oleh peningkatan cakupan pengawasan keamanan pangan dan objek pengambilan sampel, serta optimalisasi pelaksanaan pengawasan di lapangan	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena SDM melaksanakan penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan sesuai rencana. Sarana yang disediakan memenuhi standar teknis yang ditetapkan dan didokumentasikan	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua kegiatan dapat diselesaikan sesuai target.

	sehingga jumlah sampel yang diperiksa melebihi target yang telah ditetapkan.	dalam 1 dokumen lengkap	

Kesimpulan efisiensi :

Bahwa seluruh Kegiatan pada ketiga program tersebut berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Rata-rata penghematan anggaran 3,85 % ;
2. Produktivitas SDM tinggi karena adanya perencanaan kegiatan yang baik dan koordinasi yang efektif dengan pemangku kepentingan ;
3. Pelaksanaan kegiatan diselesaikan tepat waktu dan sesuai target.

SASARAN 3 : Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 136,39 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	240016,5	Rp. Juta	318905,7	334022,55	255445,1	348420,0	136,39	259492,9

Indikator Nilai produksi tanaman pangan hortikultura dan peternakan merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional maupun provinsi.

Faktor pendukung keberhasilan capaian nilai produksi tanaman pangan hortikultura dan peternakan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan sasaran 3 tersebut ;
2. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder melalui bidang Pertanian tanaman pangan hortikultura dan bidang Peternakan Kesehatan hewan dengan instansi terkait ;

3. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi Pertanian tanaman pangan hortikultura dan membidangi Peternakan Kesehatan hewan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Program / Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	442.963.000	420.828.000	415.259.502	Program ini mendukung keberhasilan capaian karena pada nilai produksi pertanian penambahan luas tambah tanam pada bidang pertanian terutama tanaman pangan berperan besar dalam menambah nilai produksi pertanian di Kota Pekalongan. Dengan adanya penambahan luas tanam padi, bertambah pula luas panen padi, yang menambah pendapatan nilai produksi pertanian, dan pada nilai produksi peternakan karena pemotongan hewan meningkat.
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	248.340.000	204.797.000	202.788.158	Kegiatan ini mendukung keberhasilan capaian karena pelaksanaan pengelolaan demplot yang ada di belakang gedung Balai Penyuluh Pertanian Kertoharjo yang secara rutin dirawat dan dikelola oleh petugas yang menangani. Disamping merawat dan mengelola demplot, petugas pengelola tersebut juga dituntut untuk bisa menghasilkan hasil kebun dari tanaman yang dikelola, yang juga menjadi target penerimaan Daerah. Selain itu karena kegiatan yang berstatus sebagai silpa dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2024 ini terealisasi karena melanjutkan program Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2024 tersebut. Dengan fokus utama yaitu pendampingan kelompok-kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L) agar dapat bertahan dan berkembang, sehingga kelompok- kelompok tersebut dapat mandiri dan diharapkan semakin berkembang
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabuopaten/Kota	53.573.000	48.797.000	48.774.588	Kegiatan ini mendukung keberhasilan pencapaian karena pelatihan pasca panen yang telah dilaksanakan secara serius, agar dapat membantu para petani terutama petani dari kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

Program / Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				untuk mengembangkan pelaksanaan teknis di lapangan, sehingga mampu meng implementasikan ilmu yang di dapat dari pelatihan tersebut. Selain itu karena Varietas Unggul Baru (VUB) yang dikembangkan melebihi jumlah target yaitu 7 Varietas Unggul Baru (VUB). Ketujuh Varietas Unggul Baru (VUB) yang telah dikembangkan yaitu pisang, krisan, nanas, anggrek, agloenema, anthurium dan kentang. arietas tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi para petani khususnya petani hortikultura agar dapat mengembangbiakkan dan mendapatkan hasil yang lebih optimal dari varietas tersebut.
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten/Kota	83.550.000	83.334.000	79.805.756	Kegiatan ini mendukung keberhasilan capaian karena setiap dua bulan dilakukan pelaporan monev pakan dan pengawasan obat hewan di *Poutry Shop, Pet Shop* dan Toko Ternak. Serta karena setiap dua bulan dilakukan pelaporan terkait pemeliharaan ayam petelur berikut pasca panennya (telur untuk kelurahan yang warganya *stunting*)
Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota	57.500.000	83.900.000	83.891.000	Kegiatan Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/kota dengan indikator Persentase kenaikan pelayanan ULIB dengan target 5 persen terealisasi 42,28 persen sehingga capaian jauh melebihi target yaitu 845,53 persen. Hal ini dikarenakan bertepatan dengan musim kawin pada hewan ternak dan adanya komitmen dari petugas di lapangan serta tambahan bantuan vaksin dan obat-obatan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	116.466.000	116.466.000	113.251.400	Program ini mendukung keberhasilan capaian karena dari setiap program yang dilaksanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan mempunyai nilai manfaat.
Pembangunan Prasarana Pertanian	116.466.000	116.466.000	113.251.400	Kegiatan ini mendukung keberhasilan capaian karena dapat diselesaikan sesuai rencana dan

Program / Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				mempunyai nilai manfaat untuk pengguna layanan.
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERIER	305.194.000	283.232.000	280.943.966	Program ini mendukung keberhasilan capaian karena karena penyakit mulut dan kuku bisa dicegah dengan vaksinasi dan pemberian vitamin terhadap hewan ruminansia di Kota Pekalongan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabpuaten/Kota	63.105.000	60.589.000	59.570.538	Kegiatan ini mendukung keberhasilan capaian karena karena penyakit mulut dan kuku bisa dicegah dengan vaksinasi dan pemberian vitamin terhadap hewan ruminansia di Kota Pekalongan
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	10.984.000	9.534.000	9.220.000	Kegiatan Penjaminan peredaran benih / bibit ternak dengan indikator Jumlah benih/ bibit ternak yang beredar dengan target 200 laporan dan terealisasi 200 laporan dengan tingkat capaian 100 persen. Selain itu karena dalam satu tahun telah dilakukan Inseminasi Buatan (IB) terhadap 200 akseptor
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.720.000	10.520.000	10.302.000	Kegiatan ini mendukung keberhasilan capaian karena Pengadaan alat kesehatan pendukung pelayanan di puskeswan seperti *spuit*, masker, *glove* bisa terealisasi 100 persen
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner	212.385.000	202.589.000	201.851.428	Kegiatan ini mendukung keberhasilan capaian karena terfokus pada pengobatan ternak massal di bulan Oktober dan November 2025, yang meliputi pendataan kepemilikan ternak, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan ternak di seluruh wilayah Kota Pekalongan sebanyak 12 orang petugas pengobatan ternak massal yang terdiri dari 4 dokter hewan, 2 paramedis veteriner, 2 petugas pendataan, dan 4 petugas handling yang terbagi menjadi 4 tim. Total ada sebanyak 2855 ekor ternak yang menerima pengobatan ternak, dengan rincian 12 ekor kerbau, 193 ekor sapi perah, 142 ekor sapi potong, 1110 ekor kambing, dan 1398 ekor domba
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	13.300.000	12.300.000	12.297.741	Program ini mendukung keberhasilan capaian karena terkontrolnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terutama tanaman pangan (padi) antara lain dengan gerak cepat

Program / Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) setiap ada laporan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), sehingga serangan tidak menyebar atau bertambah banyak
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	13.300.000	12.300.000	12.297.741	Kegiatan ini mendukung karena karena terkontrolnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terutama tanaman pangan (padi) antara lain dengan gerak cepat Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) setiap ada laporan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), sehingga serangan tidak menyebar atau bertambah banyak
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	24.927.000	15.137.000	13.960.000	Program ini mendukung keberhasilan capaian karena semua pelaku usaha mengajukan dan mendapatkan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.
Peneribitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, rumah potong hewan	24.927.000	15.137.000	13.960.000	Kegiatan ini dapat terealisasi dan memperoleh capaian sesuai target karena semua pelaku usaha mengajukan dan mendapatkan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	35.707.000	85.132.000	80.572.000	Program ini mendukung terhadap keberhasilan capaian karena Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan selalu mendampingi kelompok tani dalam melaksanakan organisasi kelompok tani melalui Penyuluh Pertanian. Sehingga ketika dilaksanakan penilaian kelas kelompok tani, para kelompok sudah siap untuk dilakukan penilaian. Hasil yang didapatkan seperti realisasi di atas, lebih dari 50 persen kelompok tani yang dinilai mengalami kenaikan nilai
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	35.707.000	85.132.000	80.572.000	Kegiatan Penyuluhan pertanian, mendukung keberhasilan capaian karena melalui kegiatan ini untuk memfasilitasi para Penyuluh Pertanian dalam melakukan pendampingan kepada kelompok tani Sehingga ketika dilaksanakan penilaian kelas kelompok tani, para kelompok sudah siap untuk dilakukan penilaian.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada keenam program tersebut di atas yaitu :

Program/ Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-Anggaran Rp.204.797.000,- -Realisasi anggaran Rp. 202.788.158,- (99,01%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,99 % yang berasal dari pengurangan kegiatan monev dan rapat.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena dari pelaksanaan monev dan rapat- rapat dipersingkat.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabuopaten/Kota	-Anggaran Rp.48.797.000,- -Realisasi anggaran Rp.48.774.588,- (99,95%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,05% yang berasal dari pengurangan kegiatan sosialisasi/ pelatihan untuk petani.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena dari pelaksanaan rapat dipersingkat.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten/Kota	-Anggaran Rp.83.334.000,- -Realisasi anggaran Rp.79.805.756,- (95,76%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 4,24 % yang berasal dari pengurangan belanja pakan ternak.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena beberapa tugas fungsi dirangkap dikerjakan oleh 1 orang.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.
Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota	-Anggaran Rp.83.900.000,- -Realisasi anggaran Rp.83.891.000,- (99,98%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,02% yang berasal dari pengurangan kegiatan monev dan belanja obat.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena beberapa tugas fungsi dirangkap dikerjakan oleh 1 orang.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Pembangunan Prasarana Pertanian	-Anggaran Rp.116.466.000,- -Realisasi anggaran Rp.113.251.400,- (97,23%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 2,77 % yang berasal dari selisih nilai kontrak pekerjaan Rehab RPH Kuripan.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena beberapa tugas fungsi dirangkap dikerjakan oleh 1 orang.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERIER			
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	-Anggaran Rp.60.589.000,- -Realisasi anggaran Rp.59.570.538,- (98,31%)	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena beberapa tugas fungsi	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan dapat

Menular Dalam Daerah Kabpuaten/Kota	-Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 1,69 % yang berasal dari pengurangan kegiatan monev.	dirangkap dikerjakan oleh 1 orang.	diselesaikan tepat waktu.
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-Anggaran Rp.9.534.000,- -Realisasi anggaran Rp.9.220.000,- (96,70%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 3,3 % yang berasal dari pengurangan kegiatan rapat dan pengawasan hewan qurban di lapangan.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena beberapa tugas fungsi dirangkap dikerjakan oleh 1 orang.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-Anggaran Rp.10.520.000,- -Realisasi anggaran Rp.10.302.000,- (97,92%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 2,08 % yang berasal dari pengurangan belanja obat dan pakan ternak.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena beberapa tugas fungsi dirangkap dikerjakan oleh 1 orang.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-Anggaran Rp.202.589.000,- -Realisasi anggaran Rp.201.851.428,- (99,63%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,37 % yang berasal dari pengurangan kegiatan monev.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena beberapa tugas fungsi dirangkap dikerjakan oleh 1 orang.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-Anggaran Rp.12.300.000,- -Realisasi anggaran Rp.12.297.741,- (99,98%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 0,02 % yang berasal dari pengurangan kegiatan monev.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena beberapa tugas fungsi dirangkap dikerjakan oleh 1 orang.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
Peneribitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, rumah potong hewan	-Anggaran Rp.15.137.000,- -Realisasi anggaran Rp.13.960.000,- (92,22%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 7,78 % yang berasal dari pengurangan kegiatan pengawasan.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena beberapa tugas fungsi dirangkap dikerjakan oleh 1 orang.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-Anggaran Rp.85.132.000,- -Realisasi anggaran Rp.80.572.000,- (94,64%) -Dari total anggaran menunjukkan adanya hemat 5,36 % yang berasal dari pengurangan kegiatan banpot penyuluh pertanian dan rapat-rapat.	-Efisiensi SDM meningkat 50% karena beberapa tugas fungsi dirangkap dikerjakan oleh 1 orang.	-Efisiensi waktu 50% karena dari Semua pelaksanaan kegiatan yang ditargetkan dapat diselesaikan tepat waktu.

Kesimpulan efisiensi :

Bahwa seluruh Kegiatan pada keenam program tersebut berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

1. Rata-rata penghematan anggaran 28,67 % ;
2. Produktivitas SDM tinggi karena adanya perencanaan kegiatan dan koordinasi internal yang baik serta koordinasi eksternal yang efektif dengan stakeholder ;
3. Pelaksanaan kegiatan diselesaikan tepat waktu dan sesuai target.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Pangan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.7.243.445.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 6.521.845.987.,- atau sebesar 90,04 %. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.284.349.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.242.831.441,- atau sebesar 98,18 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran Tahun 2025
1	2	3	4
A	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp478.373.000	Rp477.987.198
I	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp116.307.000	Rp116.076.810
1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp102.837.000	Rp102.606.810
2	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Rp5.400.000	Rp5.400.000
3	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Rp8.070.000	Rp8.070.000

II	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp196.039.000	Rp195.910.588
4	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rp5.905.000	Rp5.855.000
5	Pengadaan Cadangan PanganPemerintah Kabupaten/Kota	Rp190.134.000	Rp190.055.588
III	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp166.027.000	Rp165.999.800
6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp166.027.000	Rp165.999.800
B	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp24.361.000	Rp24.360.700
IV	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Rp24.361.000	Rp24.360.700
7	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentahanan dan Kerentanan Pangan	Rp24.361.000	Rp24.360.700
C	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp26.500.000	Rp25.559.300
V	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp26.500.000	Rp25.559.300
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanaan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Rp26.500.000	Rp25.559.300
D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.781.116.000	Rp5.077.654.180
VI	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp18.633.000	Rp18.632.600
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp3.915.000	Rp3.915.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp3.690.000	Rp3.690.000
11	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp11.028.000	Rp11.027.600
VII	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.009.456.000	Rp4.329.374.546
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp4.959.096.000	Rp4.279.014.546
13	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp48.650.000	Rp48.650.000
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.710.000	Rp1.710.000
VIII	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya		Rp0
IX	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp199.138.000	Rp195.364.885
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp1.250.000	Rp1.179.000
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp53.501.000	Rp51.197.170
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp2.760.000	Rp2.759.900
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp34.028.000	Rp33.736.900
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Rp9.426.000	Rp9.288.750
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Rp1.720.000	Rp1.599.000
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp96.453.000	Rp95.604.165
X	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	Rp357.231.000	Rp355.103.849
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.640.000	Rp1.528.000
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp149.000.000	Rp147.096.777
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp206.591.000	Rp206.479.072

XI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp196.658.000	Rp179.178.300
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp59.110.000	Rp43.553.300
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp118.467.000	Rp116.548.000
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Lainya	Rp19.081.000	Rp19.077.000
E	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp420.828.000	Rp415.259.502
XII	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp204.797.000	Rp202.788.158
29	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp14.700.000	Rp14.700.000
30	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp190.097.000	Rp188.088.158
XIII	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabuopaten/Kota	Rp48.797.000	Rp48.774.588
31	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Rp9.630.000	Rp9.630.000
32	Penjaminan Permunian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Rp39.167.000	Rp39.144.588
XIV	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp83.334.000	Rp79.805.756
33	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Rp23.034.000	Rp23.016.756
34	Pengawasan peredaran bahan pakan /pakan benih/ bibit hijauan pakan ternak	Rp60.300.000	Rp56.789.000
XV	Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota	Rp83.900.000	Rp83.891.000
35	Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	Rp83.900.000	Rp83.891.000
F	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp116.466.000	Rp113.251.400
XVI	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp116.466.000	Rp113.251.400
36	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp0	
37	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Rp116.466.000	Rp113.251.400
G	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERIER	Rp283.232.000	Rp280.943.966
XVII	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabpuaten/Kota	Rp60.589.000	Rp59.570.538
38	Pemberastasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah kab/kota	Rp60.589.000	Rp59.570.538
XVIII	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Rp9.534.000	Rp9.220.000
39	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Rp9.534.000	Rp9.220.000
XIX	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.520.000	Rp10.302.000
40	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Rp10.520.000	Rp10.302.000
XX	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tekhnis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp202.589.000	Rp201.851.428
41	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Rp25.525.000	Rp25.349.900
42	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Rp177.064.000	Rp176.501.528

H	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp12.300.000	Rp12.297.741
XXI	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp12.300.000	Rp12.297.741
43	Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikura dan Perkebunan	Rp12.300.000	Rp12.297.741
I	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp15.137.000	Rp13.960.000
XXII	Peneribitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, rumah potong hewan	Rp15.137.000	Rp13.960.000
44	Pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah potong hewan	Rp15.137.000	Rp13.960.000
J	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp85.132.000	Rp80.572.000
XXIII	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp85.132.000	Rp80.572.000
45	Peningkatan Kapasitas Kelembagan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp5.850.000	Rp5.850.000
46	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp42.802.000	Rp42.802.000
47	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Rp36.480.000	Rp31.920.000
	Jumlah keseluruhan :	**Rp7.243.445.000**	**Rp6.521.845.987**

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Beberapa prestasi yang diraih Dinas Pertanian dan Pangan pada Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Di bidang Pertanian tanaman pangan dan Hortikultura, Prestasi dan penghargaan tersebut adalah salah satu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan memperoleh penghargaan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai Penyuluh Pertanian Inovator.
2. Dibidang Ketahanan Pangan berhasil memperoleh prestasi dalam urusan pangan. Prestasi yang diperoleh yaitu : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Pekalongan tahun 2025 mencapai angka 97,17, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 92,12. Capaian ini sekaligus melampaui target RPJMD Kota Pekalongan 2025 sebesar 92,62, serta berada di atas rata-rata skor PPH Provinsi Jawa Tengah (96,9) dan nasional (95,1). Hal ini menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan yang semakin beragam dan bergizi seimbang (B2SA). Capaian ini menempatkan Kota Pekalongan sebagai **peringkat pertama dengan skor PPH tertinggi untuk level kota se-Jawa Tengah;**

3.5 INOVASI

Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Tahun 2024 pernah mengikuti lomba inovasi daerah, dengan judul "alas tapa" (adaptasi lahan salin untuk tanaman padi), yaitu melaksanakan uji coba penamanan padi variates biosalin bekerja sama dengan Kodim 0710 Pekalongan, BSIP Biogen Bogor, dengan memperoleh hasil juara 3. Sedangkan untuk Tahun 2025 ini dari beberapa inovasi yang diikutkan dalam lomba inovasi daerah belum memperoleh hasil. Inovasi tersebut antara lain :

1. Inovasi smart farming di Greenhouse "DINAMIKA" (Budidaya Melon Hidroponik untuk Ketahanan Pangan), yaitu teknik pertanian modern dengan otomatisasi penyiraman dan pengaturan suhu melalui gadget ;
2. Inovasi "BANTING SABUT" (Bantuan untuk balita stunting berupa sayuran, buah dan telur). Output dari inovasi ini berupa penyaluran bahan pangan (sayur buah susu telur) kepada balita stunting di 12 kelurahan prioritas sesuai SK Walikota.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan Umum Capaian Kinerja.

Capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam Bab 3, Dinas Pertanian dan Pangan telah melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya, mengacu pada misi Walikota Pekalongan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yaitu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tugas-tugas Dinas Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan program prioritas nasional pada tahun 2025, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026 dan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala telah diidentifikasi dan dianalisis untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan- kebijakan yang mampu mendorong percepatan pencapaian target kinerja.
3. Sasaran-sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2025 berhasil dicapai dengan nilai capaian sebesar 112,19 % atau Sangat Berhasil serta efisiensi sumber daya sebesar 24 %. Hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 dengan nilai capaian sebesar 110,98 % atau Sangat Berhasil, serta efisiensi sumber daya sebesar 0,83 %.

B. Permasalahan dan Langkah kedepan.

Secara umum Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Akan tetapi terdapat hambatan yang muncul selama tahun 2025 antara lain :

1. Masih belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat di Kota Pekalongan, tercermin dari skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kota Pekalongan yang masih belum mencapai skor 100. Hal ini perlu diatasi dengan berbagai upaya diantaranya yaitu melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) serta peningkatan

ketrampilan dalam pengolahan pangan berbasis pangan lokal dan berbagai upaya diversifikasi pangan lainnya baik melalui sosialisasi, lomba maupun pelatihan.

2. Jumlah cadangan pangan daerah Pemerintah Kota Pekalongan yang belum sesuai dengan jumlah yang dianjurkan berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional RI No. 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
3. Masih kurangnya dukungan pemerintah daerah dan lintas sektoral dalam pembangunan ketahanan pangan.
4. Masih ditemukannya pangan segar tidak aman di pasaran. Perlu dilaksanakan pengawasan dan pembinaan rutin khususnya di pasar-pasar tradisional. Selain itu juga perlu terus dilakukan edukasi terkait keamanan pangan dengan sasaran masyarakat pada umumnya.
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk olahan pangan variasi. Hal ini perlu diatasi dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan B2SA dan upaya meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam upaya diversifikasi pangan melalui sosialisasi, lomba dan pelatihan. untuk olahan pangan variasi melalui sosialisasi dan pelatihan;
6. Faktor alam berupa banjir hujan/ air pasang (rob), mengakibatkan lahan pertanian yang terdampak rob dengan kadar salinitas yang lebih tinggi dari normal. Solusi permasalahan tersebut dengan mengajukan bantuan bibit padi tahan salinitas tinggi ke Pemerintah Pusat sebagai upaya agar petani yang terdampak rob tetap bisa melakukan usaha tani ;
7. Lokasi Kota Pekalongan yang berada di pesisir Pantai, mengakibatkan pengairan air irigasi pertanian mengandalkan kiriman dari wilayah sekitar, sehingga saat musim kemarau, volume air yang sampai ke Pekalongan jumlahnya berkurang, sementara kondisi irigasi yang ada juga sudah banyak yang mengalami penyempitan/ pendangkalan.
8. Kesadaran para petani untuk menanam secara serentak dalam 1 (satu) area yang kurang, sehingga resiko serangan hama dimungkinkan silih berganti.
9. Pemanfaatan alsintan yang masih terbatas, dimana petani masih mengandalkan tenaga manusia, dari pembenihan hingga panen, yang

membutuhkan biaya besar, sementara tenaga kerja sudah mulai berkurang.

10. Permintaan alih fungsi lahan pertanian yang tinggi, terutama untuk penyediaan rumah tinggal dan tempat usaha, sehingga perlu dilakukan pencermatan kondisi lapangan dan hanya memberikan rekomendasi AFL apabila lahan dimaksud peruntukan diluar non pertanian sesuai RTRW Kota Pekalongan, sehingga perlu ada pengawalan bersama dinas teknis lainnya dalam menjaga lahan sawah dilindungi (LSD)
11. Terbatasnya jumlah Kios Penyedia Pupuk Lengkap (KPL) di Kota Pekalongan, yang tutup pada tahun ini adalah KPL Tani Berhasil dan Wahana Tani serta di akhir tahun segera menyusul KUD Pekalongan, sehingga tahun 2025 hanya ada 2 (dua) KPL.
12. Menyempitnya lahan budidaya ternak di wilayah Kota Pekalongan, oleh karena itu perlu dilakukan intensifikasi usaha ternak dengan memanfaatkan teknologi berwawasan lingkungan ;
13. Merebaknya isu penyakit hewan menular baru (New Emerging Disease), maka perlu dilakukan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dengan konsep One Health, terpadu bersama instansi terkait kesehatan dan lembaga pendidikan ;
14. Penjualan bahan pangan asal hewan yang kurang memenuhi syarat ASUH di pasar tradisional, terutama pasar darurat Banjarsari. Permasalahan ini diatasi dengan meningkatkan peran masyarakat dan aparatur pengawas dalam proses penyediaan bahan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal ;
15. Masih adanya pemilik lahan yang membiarkan lahan pertanian terbengkalai karena berbagai alasan seperti lokasi tersebut sudah tidak memiliki jaringan irigasi, atau sengaja untuk persiapan alih fungsi.

Adapun peluang yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan adalah antara lain :

1. Kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penyediaan alsintan ;
2. Terbangunnya bendung gerak di wilayah utara yang mengakibatkan wilayah-wilayah yang dulu tergenang mulai mongering, sehingga memungkinkan

untuk difungsikan kembali, tentunya dengan penanganan khusus termasuk untuk mengembalikan lahan eks pertanian ;

3. Adanya kebijakan penggunaan KTP selain Kartu tani, sehingga memberikan kemudahan petani dalam menebus pupuk bersubsidi sesuai wilayah layanan masing- masing KPL ;
4. Penambahan alokasi pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani dalam budidaya tanaman pangan dengan harapan tidak ada lagi terjadinya kelangkaan pupuk ;
5. Animo masyarakat yang cukup tinggi untuk mengikuti edukasi pertanian sejak dini, dengan mengirimkan siswa PAUD/TK/SD ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan ;

Walaupun capaian kinerja Dinas pertanian dan Pangan pada tahun 2025 sudah Sangat Berhasil, namun langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dokumen perencanaan strategis (Renstra), Pengukuran Kinerja (IKU), hingga pedoman monitoring dan evaluasi agar antara dokumen- dokumen tersebut dapat berjalan sinergis, selaras dan terukur hingga dapat terlihat capaian keluaran (output), hasil (outcome), hingga manfaat (Benefit) yang mencerminkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang optimal, efektif dan efisien ;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang diamanatkan dalam dokumen penetapan kinerja dengan mekanisme per triwulan ;
3. Seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan memberikan kontrol serta tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kinerja jajaran dibawahnya, dengan memberlakukan mekanisme reward dan punishment, agar dapat terfokus terhadap target- target yang ditetapkan hingga tercapai hasil yang maksimal ;
4. Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan, baik koordinasi yang dilakukan dengan lingkup internal ataupun

pihak/ lembaga/ instansi lain pusat dan daerah yang terkait langsung dengan upaya dan proses pencapaian sasaran strategis yang dimaksud.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan pangan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini dapat berguna baik untuk mengukur kinerjanya sendiri maupun sebagai umpan balik bagi pihak- pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, Februari 2026
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

LILI SULISTYAWATI, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700711 199603 2 003

LAMPIRAN

IKU PERUBAHAN 2021-2026

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	72.50	72.50	74.00	75.50	76.00	76.25	76.50	Inspektorat Daerah	Dinas Pertanian dan Pangan
2	Optimalnya penanganan rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani tahun N dibagi Jumlah daerah rawan pangan tahun N dikali 100 %	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	100	100	100	100	100	100	100	Susenas	Dinas Pertanian dan Pangan
3	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	Nilai produksi tanaman pangan ditambah Nilai produksi hortikultura ditambah Nilai produksi peternakan dibagi 1jt	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	240016.55	240016.55	243762.11	247578.72	251474.39	255445.13	259492.90	BPS	Dinas Pertanian dan Pangan

Pekalongan, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

Lili Sulistyawati, S.Pi, M.Si

NIP. 19700711 199603 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LILI SULISTYAWATI, S.Pi., M.Si.**

Jabatan : **Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.**

Jabatan : **Walikota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
Wali Kota Pekalongan	**Kepala Dinas Pertanian dan Pangan**
H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.	**LILI SULISTYAWATI, S.Pi., M.Si.**
	NIP. 19700711 199603 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	80,27 indeks	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bag. Organisasi
2.	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Skor PPH Konsumsi	81,03 skor	Formulasi : Skor PPH Konsumsi tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Susenas
3.	Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	0,20 %	Formulasi : Rata-rata pertumbuhan Nilai produksi tanaman pangan + Nilai produksi hortikultura + Nilai produksi peternakan Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinperpa
Sasaran :				
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	76,25 indeks	Formulasi : Nilai SAKIP tahun N

NO.	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
				Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Optimalnya penanganan rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	100 %	Formulasi : Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani tahun N / Jumlah daerah rawan pangan tahun N * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Susenas
3.	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	255445,13 Rp.Juta	Formulasi : Nilai produksi tanaman pangan + Nilai produksi hortikultura + Nilai produksi peternakan / 1jt Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Rp. 5.786.116.000,-	DTU-DAU
2. Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 478.373.000,-	DTU-DAU
3. Program Penanganan kerawanan pangan	Rp. 24.361.000,-	DTU-DAU
4. Program Pengawasan keamanan pangan	Rp. 26.500.000,-	DTU-DAU
5. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rp. 420.828.000,-	DTU-DAU/DAKNF
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 116.466.000,-	DTU-DAU
7. Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp. 283.232.000,-	DTU-DAU
8. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rp. 12.300.000,-	DTU-DAU
9. Program Perizinan usaha pertanian	Rp. 15.137.000,-	DTU-DAU

10.	Program Penyuluhan pertanian	Rp. 85.132.000,-	DTU-DAU
	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN :	**Rp. 7.248.445.000,-**	

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE., MM.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

LILI SULISTYAWATI, S.Pi., M.Si.
NIP. 19700711 199603 2 003